

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA PAO KECAMATAN TARWOANG
KABUPATEN JENEPONTO**

A.ALGI PARIS
Stambuk : 1056 40192914



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA PAO KECAMATAN TARWOANG
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**A.ALGI PARIS
105640 192 914**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa
Tarwoang Kab.Jeneponto
Nama Mahasiswa : A.Algi Paris
Nomor Stambuk : 105640192914
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si


Drs.H.Ansvari Mone,M.Pd

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Dj. Hidayat Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 730 727

NBM: 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Ibrahimuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM (Ketua)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Drs. H. Anyari Mone, M.Pd
4. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.ALGI PARIS

Nim : 10564 01929 14

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar 12 Juni 2019

Yang Menyatakan,


Algi paris

KATA PENGANTAR



Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmatnya-Nya. Karena tanpa ada campur tangannya maka skripsi yang berjudul “**Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kec. Tarwoang Kab. Jeneponto**)” ini tidak akan pernah selesai. Jiwa ini tidak akan berhenti bertahmid atas karunia yang diberikan disetiap detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederajat berkah-Mu. Sholawat dan Salam Kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu A’laihi Wasallam, yang jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh ummatnya.

Setiap insan dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandang, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang ketika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat ayahanda **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing I dan ayahanda **Drs.H. Ansyari Mone, M.Pd** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis

maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Teristimewa buat Ayahanda **A.Rusdi Tawang** dan Ibundaku tercinta **Hj. Nurnangsi S.Pd.i** yang telah berjuang, berdo'a, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses mencari ilmu. Dan terimakasih buat adik saya **A.Alfiyani Damayanti** yang telah memberikan semangat dan motivasi. Demikian pula penulis mengucapkan kepada keluarga yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan selalu menemani penulis dengan canda.

Tak lupa penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
yang telah mendampingi dalam penyusunan proposal dan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan

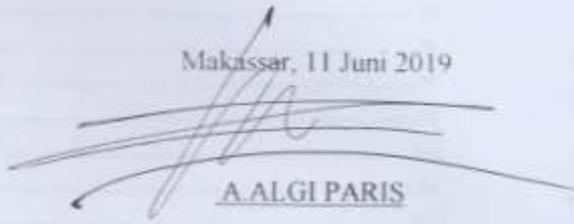
di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administrative.

5. Kepala Desa bersama Jajaran dan Masyarakat yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memeberikan informasi terkait penelitian ini
6. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Pemerintahan '14 terkhusus IP B sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat Miftah Aulia ,Windis Januari Ramadhan, Surya Hardiansyah, Muh.Nur Ilahi, , Ita Ayu Purnama, , yang tak henti-hentinya memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada penulis.
8. Terimah kasih buat Kanda Ilham Majid yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terimah kasih buat sahabat-sahbat Dian,Darmi,Darma,Dewi,Dwi handayani dewi , sahrul gunawan , ade cakra pati ,A.gatta, wandi, fahri gunawan

Telalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk anda semua.

membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Makassar, 11 Juni 2019


A. ALGI PARIS



DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.dan Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Budaya Politik.....	6
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa.....	15
C. Kerangka Pikir.	16
D. Fokus Penelitian.....	18
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Desa Pao.....	30
B. Budaya Politik Masyarakat Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.....	46
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka	63

Lampiran.....
Riwayat Hidup.



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	17



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1	Daftar Kepala Desa Yang Menjabat.....	31
Tabel 4.2	Letak Wilayah Desa Pao.....	32
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 4.4	Peringkat Kesejahteraan Masyarakat.....	33
Tabel 4.5	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	35
Tabel 4.6	Data Penduduk Berdasarkan Agama Dan Kepercayaan .. 36	
Tabel 4.7	Data Iman/Rohaniawan dan Rumah Ibadah.....	37
Tabel 4.8	Mata Pencaharian/Perkerjaan Masyarakat Desa Pao.....	38
Tabel 4.9	Data Keluarga Berdasarkan Pendapatan Per-bulan.....	38
Tabel 4.10	Aset Ekonomi Masyarakat Desa Pao.....	39
Tabel 4.11	Kelembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pao.....	39
Tabel 4.12	Lahan Produktif Masyarakat.....	40
Tabel 4.13	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	40
Tabel 4.14	Kepemilikan Ternak.....	42
Tabel 4.15	Konflik 2 Tahun Tearakhir Desa Pao.....	43
Tabel 4.16	Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

Kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja dapat menimbulkan kecenderungan pola dan sikap perilaku yang cukup variatif terutamamenghadapi proses pemilihan Kepala Desa. Terbukti dari hasil pengamatan. Mengenai sosok/figur calon, hinggakriteria yang mereka harapkan dari masing-masing calon. Umumnya mereka mengharapakan adanya calon baru yang nantinyadapat mendatangkan perubahan dan peningkatan di bidang kesejahteraan, sarana prasarana dan lingkungan sosial yang lebih nyaman

Seperti yang terjadi di Desa pao, dimana permasalahan tentang politik budaya dari penduduk tersebut adalah masyarakat dan hasil dari pemilihan

kepala desa tersebut dimenangkan oleh calon yg berpihak. Sehingga dikhawatirkan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan kepala desa cenderung lebih mengutamakan kepentingan keluarga.

Hal ini yang kemudian menjadi demokrasi di tingkat desa maupun kota yang mana budaya politik masyarakat kini cenderung lebih terlihat sehingga membentuk suatu sikap masyarakat dalam setiap pilihan politiknya. Pertimbangan kesamaan etnis, agama, dan keterpopuleran menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik sehingga hal yang lebih penting seperti kapasitas dan kualitas dari calon tersebut tidak menjadi sebuah bentuk prioritas penilaian objektif dari masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pemilihan langsung Kepala Desa, masyarakat diharapkan dapat memilih kepala desa yang jujur, berkualitas, berkompeten dan tegas sesuai dengan hati nurani agar terciptanya pemerintahan baru yang lebih transparan dan *legitimate*. Tanpa melihat latar belakang suku calon Kepala Desa tertentu.

Pengharapan masyarakat yang tinggi terhadap citra figur adalah sebuah kewajaran, apabila melihat sejarah perpolitikan di Indonesia yang cenderung mengalami stagnasi bahkan kemerosotan politik masyarakat pada orde baru cenderung menganggap partisipasi dalam pemilu merupakan kegiatan yang kurang penting untuk kehidupan mereka anggapan bahwa memilih pemimpin merupakan kegiatan yang biasa saja, membuat jarak pemisah masyarakat dan pemimpinnya.

Hal ini menyebabkan acuh tak acuh mereka untuk mengenali kualitas dan keperibadian pemimpinnya. Kekecewaan tersebut mencerminkan Budaya Politik yang dikuasai oleh penguasa saat itu. Pengertian sikap politik dalam dunia politik

sikap mempunyai peranan penting dalam menunjukkan kecenderungan berperilaku, dan hal ini menjadi perhatian serius para ahli psikologi, politik dan disiplin ilmu lainnya.

Budaya politik masyarakat yang terjadi saat cenderung melihat dari etnis salah satu calon. Hal ini dilihat. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, jika melihat dari budaya politik yang terjadi di Desa pao masyarakat cenderung menilai calon Kepala Desa dari sisi kelurahan.

Pemilihan secara langsung dianggap sangat penting karena dapat menciptakan suasana baru dalam kehidupan politik pemerintahan yang demokratis di mana kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi hal yang selalu diutamakan. Pemilihan kepala desa berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2015 di Desa pao.

Berdasarkan penelusuran Kami dalam budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa pao, kecamatan tarwoang. kabupaten jenepono yang menerapkan tujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa pao kecamatan tarwoang. Pada pemilihan umum kepala desa di Desa pao terdapat dua calon yaitu yaitu calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama sudirman tatu, dan calon nomor urut 2 (dua) atas nama sudirman tompo. Kedua calon tersebut mempunyai pengaruh terhadap sikap politik masyarakat walaupun sudah terlihat dukungan terhadap salah satu calon.

Menurut Almond dan Sidney Verba (1984 ; 16), Budaya politik adalah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas.

Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Maka dari deskripsi diatas maka kami mengambil pembahasan penelitian dengan judul **"Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pao Kecamatan Tarwoang Kabupaten Jeneponto"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka bisa di tarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pao Kecamatan Tarwoang Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pao Kecamatan Tarwoang Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan .
2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah implementasi kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul untuk mengukur pola orientasi politik masyarakat yang ada dalam sistem politiknya, juga erat kaitannya dengan sikap dan tingkah laku individu dalam sistem politik. Menurut Sitepu (2012:163) menyatakan konsep budaya politik muncul, sejak tahun 1950 saat budaya politik (*political culture*) menjadi alat analisis dalam ilmu politik. Di bawah ini pengertian budaya politik menurut para ahli.

- a. Budiardjo (2008:58) budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.
- b. Kantaprawira (2006:26) budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang.
- c. Roy Macridis dalam Maksudi, (2012:49) budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama.
- d. Widjaja (1988:250) budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala-gejala;

benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka.

Berdasarkan pengertian budaya politik di atas, mengartikan suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politik kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Menurut Almond dan Sidney Verba (1984:14) budaya politik dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan matang di lingkungan masyarakat terutama mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.

Indikator budaya politik merupakan pernyataan untuk menyampaikan sikap dan perasaan terhadap sistem politik itu berlangsung. Menurut Pye (dalam Kavanagh, 1982:11) indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti, wawasan politik, sebagaimana hubungan antara tujuan dan cara setandar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik. Indikator-indikator budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai. (Mulyawan, 2015)

Agar dapat diperoleh pendekatan dan gambaran yang tepat tentang orientasi individu terhadap budaya politik, perlu dilakukan pengetahuan tentang informasi mengenai pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok politik. Adapun objek-objek orientasi tersebut Almond dan Sidney

Verba (1984: 20) menjabarkan bagian-bagian sistem politik meembedakan tiga golongan objek:

- a. Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif dan birokrasi.
- b. pemegang jabatan; seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator.
- c. kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan dan struktur secara timbal balik dapat diklafisir apakah mereka termasuk dalam proses atau input politik atau dalam proses administratif atau output.

Almon dan Verba (dalam Kavanagh 2006:12) telah mengklasifikasi orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif sikap terhadap objek politik untuk menggambarkan suatu tipology budaya politik yang ideal, orang-orang yang ikut terlibat, subyek dan daerah. Orientasi itu positif bagi semua obyek, mereka mengatakan bahwa budaya politik itu adalah hal yang turut berpartisipasi. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat.

Orientasi-orientasi individual dalam masyarakat terhadap sistem politik, dapat dijadikan arah penentuan tipe kebudayaan politik suatu masyarakat. Untuk menentukan orientasi tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara sistematis. Budiardjo(2008:18) menggolongkan dimensi orientasi politik sebagai berikut:

- a. sistem sebagai objek umum meliputi, pengetahuan individu terhadap sistem politik, baik mengenai pengertian sistem politik yang dianut di negaranya,

sejarah, sifat-sifat konstitusi dan pengetahuan umum lainnya yang menyangkut sistem politik di negara bersangkutan.

- b. Objek-objek input meliputi, pemahaman individu mengenai input sistem politik, seperti pengetahuan mengenai struktur dan peranan elit politik serta mekanisme pengajuan-pengajuan tuntutan politik atau pengajuan kebijaksanaan politik. Kemudian perasaan-perasaan individu mengenai struktur elite beserta proposal kebijaksanaan yang mereka ajukan ke sistem politik.
- c. Objek-objek output meliputi, pemahaman individu mengenai output sistem politik, seperti pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh sistem politik. Juga mengenai mekanisme pemunculan kebijakan-kebijakan tersebut serta mengenai perasaan mereka terhadap dampak yang dirasakan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sistem politik.
- d. Pribadi sebagai objek, menyangkut argumentasi individu mengenai perasaannya sebagai bagian dari sistem politik. Lalu pengetahuan mereka terhadap hak-hak, kewajiban serta strategi-strategi individu untuk melakukan tekanan atau mempengaruhi sistem politik.

Realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui penelitian mereka di lima negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai

yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.

2. Tipe Budaya Politik

Budaya politik suatu masyarakat berbeda dengan budaya politik masyarakat lain, Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dari tipe-tipe budaya politik. Budaya politik pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh sosial, budaya, ideologi, ekonomi, dan kondisi geografisnya. Almond dan Sidney Verba telah mengkalifikasikan tipe budaya politik yaitu, parokial, subjek, partisipan dan campuran. (Mulyawan, 2015)

a. Budaya Politik Parokial

Budiardjo (2008: 20) menyatakan orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komperatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif yang rendah. Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapanharapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik.

Pada kebudayaan politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan

fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Menurut Budiardjo (2008:21) secara relatif parokialisme murni itu berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spealisasi politik berada pada jenjang yang minim. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif.

b. Budaya Politik Subjek/Kaula

Orientasi kaum subyek/kaula terhadap obyek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output. Menurut Budiardjo (2008:21) budaya politik subyek/kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah.

Menurut Kantaprawira (2006:33) budaya politik Subjek/kaula adalah, dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output, sedangkan perhatiannya atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi subyek dalam sistem politik yang telah mengembangkan perantara-perantara demokrasi lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.

Orientasi subjek menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi atau

mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apa lagi ditantang. Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

c. Budaya Politik Partisipan

Pada kaum partisipan dimana perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Tipe budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Menurut Budiardjo (2008:22) tipe budaya politik partisipan merupakan bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap aspek input maupun output dari sistem itu. Budaya politik partisipan masyarakat merealisasi dan memergunakan hak-hak politiknya, dengan demikian masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Kemudian masyarakat ini akan menyadari hak dan kewajibannya serta memergunakan secara aktif. Mereka akan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik terhadap sistem sebagai totalitas, *input* dan *output* maupun

terhadap posisi atau peran dirinya sendiri.

d. Budaya Politik Campuran

Budaya politik dapat diartikan sebagai campuran orientasi warga negara, merupakan campuran partisipan, subyek, dan parokial. Pada setiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu budaya, walaupun di negara maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial, inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. Kombinasi antara tiga tipe budaya politik diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran.

Secara konseptual menurut Budiardjo (2008: 27-31), terdapat tiga tipe budaya politik campuran, yaitu:

- 1) Kebudayaan subyek – parokial, adalah tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukaan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
- 2) Kebudayaan parokial – partisipan, terdapat masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah negara yang sedang berkembang. di negara tersebut budaya politik yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan; demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan.
- 3) Kebudayaan partisipan – subyek, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian

orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sementara sisa penduduk lainnya terus diorientasikan ke arah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif.

Budaya politik campuran merupakan percampuran dari ketiga budaya politik, antara parokial, kaula, dan partisipan. Adanya tipe politik campuran ini dikarenakan bahwa orientasi terhadap satu tipe tertentu tidak menggantikan tipe yang lain. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pendekatan budaya politik Almond dan Verba akan digunakan sebagai acuan dalam memahami budaya politik Masyarakat desa pao kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. Peran kebudayaan politik sebagai rantai penghubung antara mikro dan makro politik, tentu sangat tepat pijakan teori budaya politik ini digunakan dalam penelitian ini, karena pada titik mikro penelitian ini mencoba memahami budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa pao kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. Budaya politik yang disampaikan Almond dan verba memang cenderung berbicara dalam lingkup negara, artinya budaya politik secara luas pada sebuah negara. Tetapi pada bagian pengantar (1984:1-5) disebutkan bahwa pendekatan budaya politik dapat digunakan untuk mengkaji kebudayaan politik dalam lingkup komunitas tertentu. Hingga secara teoritis pendekatan budaya politik Almond dan Verba ini bisa digunakan untuk mengetahui budaya

politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa pao kecamatan tarowang kabupaten jenepono.

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Desa.

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini dan Archna Sutomo (2007:25) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiada lain sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Berdasarkan pada Pasal 31 dan Pasal 36, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

1. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
3. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta budaya politik dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

C. Kerangka Pikir

Budaya politik sangat berkaitan dengan perilaku memilih dalam hubungannya dengan proses pemilihan umum. Budaya politik merupakan studi

tentang pandangan individu atau kelompok tentang objek politik yang kemudian akan mempengaruhi pilihan politiknya dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana budaya politik Masyarakat di Desa Pao dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pao, dan untuk menjelaskan lebih jauh terkait dengan budaya politik Masyarakat di Desa Pao dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pao, maka melalui beberapa tipe budaya politik yaitu : tipe budaya parokial, subjek, partisipan dan budaya politik campuran. Melalui keempat tipe tersebut dapat dianalisis tipe budaya politik manakah yang ada dalam pemilihan kepala desa di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten . Jeneponto.

Landasan teoritik dengan empat tipe budaya politik tersebut menjadi pisau analisis dan pijakan teoritik untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Budaya Politik
Masyarakat

Parokial

Subjek/kaula

Partisipan

Pemilihan Kepala Desa Pao, Kec.
Tarowang, Kab. Jeneponto

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan guna untuk memperjelas ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga untuk memberi panduan bagi peneliti selama di lapangan, hingga peneliti tidak terlalu disulitkan dengan datum-datum yang terlalu banyak hingga akan mempersulit analisa data. Meski demikian fokus penelitian tidak mengikat secara mutlak peneliti, karena fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara.

Penelitian ini juga menyusun fokus penelitian, untuk mempermudah peneliti di lapangan serta untuk membatasi studi dalam penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini untuk melihat budaya politik dan tipe budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan pendekatan teori maka dalam menentukan budaya politik, pada penelitian ini dengan menggunakan analisis penelitian yang meliputi meliputi orientasi politik kognitif, afektif dan evaluatif masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagai objek politiknya, berikut uraian fokus penelitian:

Pertama penulis menyajikan gambaran budaya politik dengan mengidentifikasi orientasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif. Aspek kognitif, membahas tentang aktivitas-aktivitas masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Aspek afektif mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala Desa

Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Kemudian Aspek evaluatif membahas mengenai penilaian dan tindakan masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Kedua, setelah mendapat gambaran tentang budaya politiknya, Penulis menganalisis tipe budaya politik berdasarkan data dari orientasi masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Sesuai dengan tinjauan teori yang digunakan, maka dalam menklasifikasikan tipe budaya politik, sebagai berikut.

1. Sistem sebagai objek umum, memaparkan orientasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang bersifat umum, seperti bagaimana pengetahuan mengenai apa itu pemilihan kepala desa, pengetahuan mengenai pemerintah desa, fungsi dan tujuan pemerintah desa dan wawasannya dalam pengetahuan legitimasi pemerintah desa dalam kaitanya fungsi dan tujuan pemerintah desa.
2. Objek input, memaparkan orientasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tentang bagaimana mereka mempengaruhi sistem politik meliputi, bagaimana mereka melibatkan diri dalam pemilihan kepala desa, dengan cara apa mereka melakukannya dan bagaimana kecenderungan mereka terhadap penentuan pilihan terhadap calon kepala desa.
3. Objek output, memaparkan orientasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tentang

bagaimana mereka menentukan pilihan terhadap calon kepala desa khususnya hal-hal yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihannya.

E.Deskriptif Penelitian

Deskripsi Penelitian pada orientasi terhadap objek politik diatas akan mengkalasifikasi kecenderungan tipe budaya politik.Sesuai denga tinjauan teori yang digunakan yaitu, teori budaya politik menurut Almond dan Verba. Orang Rimba akan dianalisis kecenderunga tipe budaya politik, apakah mereka tergolong pada tipe parokial, subjek, partisipan atau tipe campuran. Adapun yang menjadi indikator dalam mengklasifikasi tipe budaya politik,dapat diketahui dari ciri-cirinya, sebagai berikut :

1. Budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup atau wilayah tempat ia tinggal, dengan kata lain, persoalan diluar wilayahnya tidak diperdulikannya.
Ciri-ciri budaya politik parokial :
 - a. Warga negara tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali yang ada disekitarnya.
 - b. Warga negara tidak banyak berharap terhadap system politik yang ada.
 - c. Belum adanya peran-peran politik yang khusus.
2. Budaya politik subjek, masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan

kedudukannya. Akan tetapi peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat, Individu atau masyarakat hanya menerima aturan tersebut secara pasrah.

Ciri-ciri budaya politik subjek atau kaula :

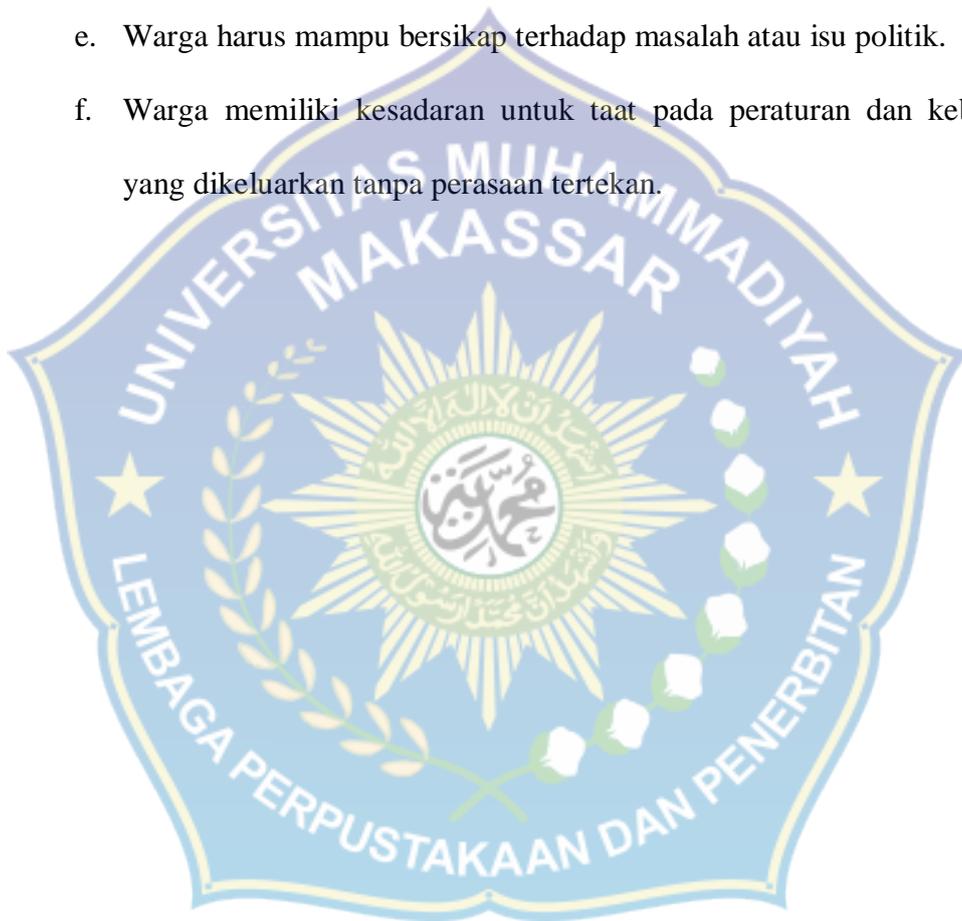
- a. Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap obyek politik output, sedangkan kesadaran terhadap input rendah.
 - b. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
 - c. Masyarakat tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah dan tidak berdaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusannya.
 - d. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi ditentang.
3. Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang sangat ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Masyarakat mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun proses output (pelaksanaan, penilaian dan pengkritik setiap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

Ciri- ciri budaya politik Partisipan:

- a. Anggota masyarakat sangat berpartisipasi terhadap semua obyek politik, baik menerima atau menolak suatu obyek politik.
- b. Kesadaran bahwa masyarakat adalah warga negara yang aktif dan

berperan sebagai aktivis.

- c. Warga negara menyadari akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya selaku warga negara.
- d. Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua obyek politik.
- e. Warga harus mampu bersikap terhadap masalah atau isu politik.
- f. Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan Agustus dan September tahun 2018, adapun lokasi penelitian ini merujuk pada Masyarakat Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dimana akan ditentukan berdasarkan pengelompokan Dusun tempat tinggalnya, yang terbagi ke dalam enam dusun : Dusun Kampung Bendi, Dusun Pao, Dusun Tonroa, Dusun Kampung Beru, Dusun Kaloko, dan Dusun Sunggumanai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian.

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen lainnya serta data yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.

D. Informan Penelitian

Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sampel dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi atau sampel. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel Informan

no	Nama	Insial	Jabatan	Jumlah
1	BU Ningsih	BN	Kepala Dusun	1
2	Ust Bactiar Dg Gasing	BG	Iman dusun	1
3	Elda Resti Ardi	ERA	PNS	1
4	Imran Majid	IM	Wakil karang taruna	1
5	Saripudin Sila	SS	RK dusun	1
6	Guntur Arafat	GA	Ketua sangar seni	1
7	Pak Kasman	PK	Kepala dusun	1
	TOTAL INFORMAN			7

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga macam teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi.

2. Observasi

Observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, di samping itu observasi juga dimaksudkan untuk mengamati dan mencermati peristiwa keseharian masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

3. dokumentasi

dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip dan berbagai laporan mengenai aktivitas politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan juga catatan-catatan yang berkaitan dengan objek politik dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Sofyan Efendi (2006: 278), adalah sebagai berikut:

1. *Editing* Data, adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat

digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

2. Interpretasi Data, yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data secara intensif baru dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara analisa, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa pao kecamatan tarowang kabupaten jeneponto, kemudian juga mengklasifikasi tipe budaya politiknya, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Adapun data yang telah direduksi, meliputi data primer primer dan sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian ini, data yang dianggap tidak perlu seperti ungkapan-ungkapan informan yang melebar atau tidak sesuai dengan fokus kajian dijadikan referensi lain bagi penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan kemudian disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah ke dua dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:252).

H. Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, pada penelitian ini terdapat beberapa sumber dengan latarbelakang yang berbeda yaitu, pemegang jabatan dalam struktur organisasi, masyarakat dan pemuda guna mendapatkan data valid tentang orientasi Budaya politik Masyarakat. Kemudian juga ungkapan dari Warga desa.

2. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam penelitian ini setelah melakukan wawancara mendalam dilakukan juga observasi pada informan dan studi dokumen.

3. Trianggulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak maslaah, akan memberikan data

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pao

a. Sejarah Desa Pao

Desa Pao pada awalnya adalah lingkungan dengan nama lingkungan sunggu mania dibawah pemerintahan Desa Tarwoang. Setelah sekian tahun lamanya, penduduk semakin bertambah dan berkembang sehingga pada tahun 1989 lingkungan sunggu mania ditingkatkan stastunya menjadi Desa persiapan dan pisah dari induk pemerinatahan Desa Tarwoang. Desa Persiapan tersebut diberi nama Desa Pao .

Pengambilan nama Desa Persiapan Pao tersebut adalah pada zaman penjajahan colonial belanda, lingkungan sunggu mania adalah salah satu lingkungan yang bertugas sebagai pemberi informasi tentang keberadaan dan kedatangan pasukan belanda dari laut, setiap kedatangan pasukan belanda maka seorang warga lingkungan ini melaporkan kepada pusat pemerinatahan di Tarwoang, jadi pemberi informasi ini di sebut dalam bahasa Makassar “Tumappau” sehingga diambil potongan kata dari Tumappu tersebut menjadi kata “PAO” yang artinya penyampaian, dan di bentuk wilayah pemerintahan Desa Pao Dimana dipimpin seorang kepala Desa/Lurah dimana Desa Pao terdiri dari enam dusun yaitu Dusun kampung bendi, Dusun Pao, Dusun kampung Beru, Dusun Kaloko, Dusun Tonroa, Dusun Sunggu manai, dan peristiwa penting yang pernah terjadi di wilayah Desa Pao antara lain ;

Tabel 4.1

Daftar Kepala Desa Yang Menjabat

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1989-1993-2001	H. Abullah Gassa	Dua periode
2	2001-2006	Abul Rachman Gasing, SE	Satu periode
3	2006	Kahar liwang	Pelaksana Tugas
4	2006-2008	H.Kurais	Satu periode
5	2009-2015	Abdul Azis, SE	Satu periode
6	2015	Nurcaya SH	Pelaksana Tugas
7	2015-2021	Sudriman tatu, spd	Kepala desa

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Tabel diatas merupakan peristiwa penting yang pernah terjadi di desa pao dalam pemilihan kepala desa dari masa-kemasa dan masa jabatan kepala desa sudah bertambah sekarang menjadi Enam Tahun

b. Geografis Desa

Secara geografis dan secara administratif Desa Pao merupakan salah satu dari 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dan memiliki luas wilayah $\pm 4,6$ KM². Dusun Kampung Bendi sebagai ibukota Desa Pao berjarak ± 3 KM dari ibukota Kecamatan Tarowang dan berjarak ± 17 KM dari Bontosunggu sebagai ibukota Kabupaten Jeneponto.

Secara topografis Desa Pao terletak pada ketinggian ± 0.050 M di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Pao yang terletak pada bagian Selatan Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung dengan: sebelah utara

dengan Desa Tarawang, sebelah timur dengan laut Flores, sebelah selatan dengan Desa Bungeng, dan sebelah barat dengan Desa Bontorappo

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pao Tahun 2015

No.	Jenis Kelamin	Jiwa
1.	Laki – Laki	1.607
2.	Perempuan	1.690
3.	Transgender	0
TOTAL		3.297

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Jumlah Penduduk Desa Pao berdasarkan Profil Desa tahun 2015 sebesar 3.297 jiwa yang terdiri dari 1.607 jiwa laki-laki dan 1.690 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 935 KK.

Tabel, 4.4

Jumlah Keluarga berdasarkan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat

No.	Peringkat Kesejahteraan	Jumlah KK
1.	Sangat Miskin	358
2.	Miskin	313
3.	Sedang	159
4.	Kaya	105
JUMLAH		935

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Pada tabel di atas dasarnya masyarakat Desa Pao masih banyak yang tergolong miskin. Bahkan dari hasil pendataan seperti yang tertera pada tabel diatas ternyata persentase peringkat kesejahteraan keluarga

dengankategori sangat miskin juga masih tergolong yang paling tinggi, yaitu 358 keluarga dari 935 keluarga.

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Mutu dan tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan pendidikan yang lebih maju maka akan dengan mudah pula masyarakat memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pao, diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pao ini cukup baik namun belum merata disemua kalangan karena masyarakat kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini berdasar pada hasil sensus Desa Pao Tahun 2015 dimana kategori tidak/belum Sekolah terdapat 212 jiwa, tamat SD/ sederajat 1.702 jiwa, tamat SMP/ sederajat 504 jiwa, tamat Smu/ sederajat 397, tamat DIII berjumlah 7 jiwa, tamat S1 berjumlah 72 jiwa dan tamat S2 berjumlah 3 jiwa. Berdasarkan dengan data hasil sensus tersebut dapat di jelaskan bahwa Fenomena pendidikan di Desa Pao memang cukup baik, tetapi itu tidaklah merata pada semua kalangan karena hanya golongan menengah yang mengalami sementara bagi kalangan bawah harus putus sekolah atau berhenti.

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa Agama dan kepercayaan yang dianut penduduk Desa Pao sebagian besar agama Islam dan terdapat 1 keluarga beragama Kristen protestan yang mana keluarga Kristen ini adalah Kepala PUSTU Dusun Kampung Beru Desa Pao.

d. Kondisi ekonomi

Ditinjau dari letak geografis, Desa Pao sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan, Budidaya Rumput Laut, Petani Jagung Kuning dan pengembangan usaha perdagangan, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak yang menikmati sumber daya yang ada. Pemanfaatan keberadaan pasar yang ada di Desa Pao belum dinikmati masyarakat secara luas terutama belum maksimalnya keterlibatan pedagang-pedagang kecil didalam pasar. Adanya permainan harga oleh para pengumpul dan tengkulak terhadap hasil panen petani, baik hasil panen rumput laut maupun hasil panen Jagung dan lain-lain. Hal tersebut bisa diukur dari pendapatan/penghasilan tabel berikut;

Tabel 4.5

Jumlah Keluarga berdasarkan Pendapatan per-Bulan

No.	Pendapatan per bulan	Jumlah KK
1.	Kurang dari Rp 500.000	224
2.	Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,-	347
3.	> Rp 1.000.000,- - Rp 2.000.000,-	171
4.	> Rp 2.000.000,- - Rp 3.000.000,-	103
5.	> Rp 3.000.000,- - Rp 5.000.000,-	78
6.	Lebih dari Rp 5.000.000,-	32
JUMLAH		935

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Pada tabel diatas mayoritas masyarakat atau keluarga di Desa Pao masih tergolong berpendapatan rendah, hal ini berdasarkan sata statistik Desa Pao seperti yang tertera pada tabel, dari 935 keluarga di Desa Pao untuk kategori keluarga yang berpenghasilan Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- tergolong masih memiliki angka tertinggi yaitu 347 keluarga dibanding kategori lainnya.

e. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1.	Pemerintah Desa	11	9	2
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11	10	1
3.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	9	6	3
4.	PKK	38	-	38
5.	Imam Desa (PPN), Imam Dusun	7	7	-
6.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	2	-	2
7.	Posyandu	25	-	25
8.	Dasawisma	25	-	25
9.	Rukun Keluarga (RK)	6	6	-
10.	Karang Taruna (KT)	35	30	5
11.	(TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA, Pesantren)	569	279	290
12.	Kelompok Nelayan	100	83	17

13.	Kelompok Tani	300	250	50
14.	Kelompok Usaha	25	13	12
15.	TKA/TPA	50	31	19
16.	Mesjid	6	-	-
17.	Majelis Ta'lim	30	0	30

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Pada Tabel diatas Terdapat sejumlah organisasi dan lembaga di Desa Pao, baik formal maupun nonformal, yang mempunyai peran dan fungsi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan masing-masing organisasi atau lembaga tersebut dibedakan atas : (i) Organisasi/Lembaga yang dibentuk atas inisiatif murni masyarakat guna memenuhi kepentingan masyarakat, (ii) Organisasi/Lembaga yang muncul dan tumbuh atas inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional oleh “pihak luar”, (iii) Organisasi/Lembaga yang merupakan bentukan “pihak luar” yang inisiatif pembentukannya tidak berasal dari masyarakat

f. Dinamika Konflik:

Tabel 4.7

Konflik 2 Tahun terakhir Desa Pao

No.	Jenis Konflik	Penyebab	Pemecahan
1.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terbangunnya prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa; - Rendahnya pengetahuan pemerintah desa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Terjadinya peralihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi desa; - Memberikan pembekalan dan pembinaan bagi aparat pemerintahan Desa.

		kepemimpinan pemerintahan Desa.	
2.	Hubungan antar lembaga desa tidak harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjalannya komunikasi yang baik antara lembaga yang satu dengan yang lainnya; - Kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pembinaan kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan terhadap lembaga desa secara rutin dan berkesinambungan
3.	Kebakaran Rumah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak rumah tangga yang memakai listrik PLN dengan cara menyambung dari tetangga sehingga terjadi kecelakaan arus pendek listrik; - Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi sehingga rumah tangga tersebut tidak mampu membeli meteran listrik. - Rendahnya pengetahuan warga tentang Listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi warga kebakaran dalam pemberian bantuan - Memberikan sosialisasi terhadap bahaya kebakaran - Memberikan penyuluhan tentang cara menanggulangi kebakaran

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Pada tabel dijelaskan bahwa Berlakunya undang-undang nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan di Desa Pao selama kurang waktu 2 tahun terakhir dimna tahun 2014-2015-2016 adalah masa transisi pergantian Kepala Desa, dari pejabat kepala desa sampai kepada kepala desa depintif sekarang sehingga konflik selalu mewarnai pemerintahan tersebut. Beberapa konflik yang terjadi 2 Tahun terakhir ini

Tabel 4.8

Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa

No.	Masalah	Potensi
1.	Pada musim hujan sering terjadi banjir dan genangan air hujan di jalan	- Selokan/Saluran - Gotong Royong
2.	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Gotong Royong
3.	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sumur bor dan perpipaan - Sumur Gali
4.	Pada musim panen sering gagal panen	- Lahan - Kendaraan
5.	Setiap musim pencurian sering terjadi	- Babinsa - Bhabinkantibmas - Masyarakat
6.	Pada musim kemarau pengangguran meningkat	- Masyarakat

Sumber : Data Statistik Desa Pao Tahun 2015

Pada tabel tersebut diatas dijelaskan beberapa masalah sekaligus berpeluang menjadi potensi jika dikelola atau dimanfaatkan sedemikian rupa yang kerap hadir atau datang pada berbagai musim, dengan berbagai solusi pemecahan terhadap masalah-masalah tersebut. Pada tabel tersebut pula di petakan masalah-masalah yang terjadi, misalnya pada musim kemarau cenderung ekonomi masyarakat menurun dikarenakan pertanian kadang gagal panen, sehingga dibuat pulalh potensi atau penyelesaian masalah yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk memikirkan sumber pemasukan atau sumber ekonomi lain yang bisa di tempuh pada saat musim kemarau tiba, seperti berjualan ikan, atau berdagang yang lainnya di pasar.

B. Budaya Politik Masyarakat Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Pada bagian ini akan dibahas secara mendalam tentang Budaya Politik Masyarakat Desa Pao dalam Pemilihan Kepala Desa Pao berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap semua informan dan Berapa Kepala Dusun yang ada di desa pao dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi dalam beberapa klasifikasi yang menjabarkan mulai dari indikator-indikator orientasi budaya politik

Kemudian dari hasil wawancara yang telah diklasifikasikan sesuai indikator orientasi budaya politik akan disimpulkan oleh informan untuk di yakin kepada masyarakat dan pemuda yang akan menjelaskan kearah kemana tipe budaya politik itu sendiri apakah kearah parokial, subjek/kaula, atau partisipan

Pada bagian ini akan membahas secara mendalam tentang pola orientasi masyarakat yang dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. mengajukan klasifikasi tipe-tipe orintasi politik, yaitu; komponen kognitif, afektif, dan evaluatif. Tokoh masyarakat dan pemuda yang akan menjelaskan kearah mana tipe budaya politik itu sendiri apakah kearah parokial, subjek/kaula, atau partisipan.

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara

kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sepertinya masyarakat Desa Pao tidak termasuk dalam tipe budaya politik parokial. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa wawancara terhadap beberapa informan.

Perasaan masyarakat Desa Pao terhadap jalannya sistem politik khususnya pemilihan kepala Desa Pao tahun 2015 kemarin adalah timbulnya perasaan kecewa dengan dibuktikan dari hampir seluruh RK dusun di desa pao yang menjawab pada saat wawancara mengenai proses pemilihan kepala desa saat itu dengan tanggapan miris karena mereka saja dilibatkan hanya untuk membagikan DPT saja tidak disertai bekal mengenai tata cara pencoblosan pada saat pilkades serta aturan dan larangan pilkades pun mereka tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat jika ditanyakan. salah satunya seperti yang diungkapkan bapak SS Rk kampung bendi yang di wawancara tanggal 28 september 2018 pukul 16.00 wib di rumahnya :

“saat pilkades kemarin saya hanya diminta pihak panitia pemilihan kepala desa membagikan DPT masyarakat kepada masyarakat dan dengan selebaran stiker untuk sosialisasi tata cara pencoblosan katanya dari panitia dan nanti mereka baru sosialisasi langsung, saya bingung maksud dari pihak panitia pemilihan kepala desa saat saya ditanya masyarakat dan saya hanya bisa menjelaskan alakadarnya saja sesuai pengalaman yang sudah-sudah yang saya ketahui” (hasil wawancara dengan SS di rumahnya)

Hal yang sama juga di katakan oleh PK kepala dusun kampung baru:

“Panitia melakukan sosialisai tapi tidak terlalu mendetail, mereka hanya memberikan alat peraga seperti stiker sepanduk dll. begituh juga dengan calon

kepala desa dan timses yang turun langsung juga lebih mengdepankan kampanye ketimbang melakukan pendidikan politik dan sosialisasi pilkades dan visi, misi terhadap masyarakat disini (28-09-2108 pukul 11.00 wit di rumah PK)

Jawaban tersebut dapat dilihat bahwa perasaan kecewa yang timbul dalam diri PK diakibatkan oleh perasaan simpatik terhadap masyarakat yang berkerja baginya masih perlu sosialisasi secara mendalam untuk pemahaman pentingnya memilih agar tingkat partisipasi tidak rendah .

Perasaan berbeda juga diungkapkan Bapak herman S, pdi Tokoh agama di dusun kaloko mengenai kinerja kepala Desa Pao Bapak Sudirman Tattu selama kurang lima 3 tahun menjabat Kepala Desa:

“saya rasa pemilihan kepala Desa kemarin sudah berjalan baik hanya kadidat yang terpilih sekarang dalam masa kepimpinannya kurang baik dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembangunan masih kurang tapi mudah-mudahan Allah SWT memeberikan yang terbaik untuk masyarakat kita”(24-8-2018 pukul 10.00 wit di rumah PH)

Pandangan kedua informan tersebut di atas dapat dilihat bahwa apabila masyarakat dihadapkan pada jalannya system politik yang menghasilkan sesuatu yang merugikan masyarakat banyak, maka yang timbul adalah perasaan negatif seperti misalnya kekecewaan terhadap pemerintah. sebaliknya apabila seperti dihadapkan pada jalannya system politik yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat, maka akan menghasilkan perasaan positif misalnya senang dan bangga terhadap pemerintah.

Berdasarkan beberapa argumen yang disampaikan oleh beberapa informan diatas secara mendasar memang menyampaikan beberapa bentuk kekecewaan, tapi hal tersebut bukanlah menggambarkan tentang sikap politik tipe budaya

parokial yang pada pengertiannya disebutkan sebagai budaya politik yang tidak begitu kuat, baik secara kognitif maupun secara afektif terhadap sistem politik di Desa Pao, melainkan bentuk kekecewaan tersebut adalah bentuk harapan atau tanggungjawab terhadap kemajuan desa yang secara tidak langsung itu menggambarkan sikap politik yang sangat kuat.

2. Budaya politik Subjek/Kaula

Sekarang penulis telah sampai pada komponen budaya politik Subjek/kaula. Dari komponenn inilah dapat ditentukan tipe dari budaya politik yang ada di masyarakat Desa Pao, Kec. Tarawang. Hal tersebut penulis identifikasi melalui wawancara terhadap beberapa informan.

Penulis mulai dengan menanyakan mengenai dukungan masyarakat terhadap Pilkades (pemilihan kepala desa) yang merupakan salah satu bagian dari system politik yang ada di Indonesia dari hasil Pilkades (pemilihan kepala desa) diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, diharapkan mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Wawancara Dengan salah satu tokoh Pemuda GA :

“saya dukung kalau yang terpilih adalah orng yang adil,jujur dan amanah,tetapi jika sebaliknya apalagi tukang korupsi dan selalu menyalahi wewenang lebih baik tidak perlu ada pilkades atau lebih baik kita sebagai masyarakat tidak memilih sama sekali”(25-8-2018 wit pukul 13.00 wit dirumah GA)

Jawaban di atas dapat dilihat bahwa dukungan akan diberikan apabila hasil dari pilkades itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yaitu terpilihnya pemimpin yang jujur,adil dan amanah.dimana hasil pilkades yang diharapkan sangat dekat dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam yang di pelajari setiap

harinya. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh dari Islam terhadap sistem politik bisa dikatakan cukup kuat.

Kaitan dengan budaya politik Alomd dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masih tergolong budaya politik subyek/kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluar (output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintahan yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia menialinya sebagai otoritas yang abash. Namun demikian, posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif, diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Lebih lanjut penulis kemudian menanyakan mengenai apa yang dapat pemuda lakukan untuk menginterpretasikan dukungan maupun penolkan terhadap jalannya sistem politik, dalam hal ini pemerintah dan jawaban pemuda ini semakin memperjelas tipe dari budaya politik yang dianut oleh masyarakat desa Pao kec. Tarwoang, seperti diungkapkan IM Wakil Ketua Karang Taruna Desa Pao:

“ Yang kami lakukan adalah mencari solusi agar suara hati kami didengar oleh mereka tetapi semua hanya habis dikedai kopi karena tidak ada yang mau bertindak sebab merasa percuma saja karena tidak akan didengar juga aspirasi masyarakat yang akan disampaikan” (30-9-2018 pukul 14.00 wit di sekeret Karang Taruna)

Masyarakat Desa Pao Kec. Tarwoang beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem secara

umum memereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh kepala desa yang berwenang dalam masyarakat.

Selanjutnya, penulis meminta tanggapan mengenai Golput yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pao pada tahun 2015 berikut jawaban dari kepala dusun kampung bendi BN :

“ Menurut saya sayang sekali masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya sebab suara mereka menutukan pemimpin yang akan menjabat 6 tahun kedepan.masyarakat yang seperti ini itu ada hal yang kemungkinan atara apatis atau memang berhalangan hadir karna disini rata-rata berkerja dan melaut.”(25-09-2018 pukul 10.30 wit di rumah kepala dusun kampung bendi)

Pemaparan di atas menunjukan bagaimana informan menilai bahwa untuk penting untuk menggunakan hak pilihnya.Kesadaran yang ada pada masyarakat mulai tinggi bukan saja dari keikutsertaan memilih dalam pilkades tetapi juga sebagai aktor yang menjadi pilihan dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Kaitan dengan budaya politik Alomnd dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masyarakat Desa Pao Kec.Tarwoang tergolong budaya politik subjek/kaula,masyarakat memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap system politiknya,namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masuk (input) dan partisipasinya dalam aspek keluar (output) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menialinya sebagai otoritas yang absah.Namun demikian,posisiya sebagai subjek(kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif.diyakini bahwa posisiya

tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya memengaruhi atau mengubah system. dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat hal kepala desa .bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan kepala desa adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah dikoreksi apalagi ditentang.

Budaya politik subjek/kaula, yaitu budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial. Dalam budaya ini individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subjek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Ciri-ciri budaya politik kaula/subjek adalah sebagai berikut:

- a. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
- b. Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.
- c. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.
- d. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

- e. Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

Dari kelima ciri budaya politik kaula/subjek tersebut masyarakat Desa Pao, Kec. Tarawang masuk kedalam lima ciri tersebut.

Hal ini dibuktikan lagi dengan pengakuan informan yang diwawancari oleh penulis untuk menguatkan hasil yang dikatakan oleh para informan .mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis sesuai dengan indikator-indikator budaya politik sehingga penulis dapat mengklasifikasikan budaya politik masyarakat Desa Pao Kec. Tarawang lebih kearah subjek/kaula karena masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (sosial maupun ekonomi),tetapi masih bersifat pasif.

Rata-rata informan berpendapat sama dengan yang dikatakan oleh kepala dusun kampung baru PK yang tinggal didusun kampung baru :

“kami sebagai masyarakat dan saya selaku kepala dusun disini merasa sudah sangat mengerti apa itu demokrasi dan pemilu bahkan saya bisa terlibat langsung bersama beberapa masyarakat disini dalam proses pemungutan suara,seperti menjadi panitia pemilihan kepala desa maupun menjadi anggota pps dan ikut dalam sosialisasi sebelum pemilihan.kami merasa semua proses pemilihan itu sama saja karena kita memilih pemimpin kita tiap-tiap periode dan tingkatannya seperti presiden sampai ke anggota dewan demokrasi saya rasakan hanya saat pemilu saja tapi setelah itu tidak ada pengaruh apa-apa bagi masyarakat dan masyarakat juga malas untuk memepengaruhi kebijakan yang ada rapat di kantor desa dan banyak ang tidak hadir”(28-9-2018 pukul 11.00 wit dirumah kepala dusun kampung bendi)

Penulis menarik kesimpulan dari yang dikatakan rata-rata masyarakat Desa pao Kec. Tarawang yang diungkap kepala dusun kampung baru masing-masing wilayah di Desa Pao bahwa mereka memahami dan mengerti tentang

pemilu, berarti tingkat orientasi kognitifnya dan masyarakat tidak peduli dengan kebijakan yang dibuat kepala desa karena masyarakat lebih memilih untuk pasif dan merasa tidak bisa mempengaruhi kebijakan sehingga sia-sia saja.

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala dusun kampung bendi BN yang mengatakan :

“saya sudah melakukan yang terbaik untuk dusun yang saya pegang, tetapi tetap saja sama saat pilkades masyarakat kebanyakan jarang hadir karena sibuk berkerja dan aktivitas lain padahal masyarakat disini cukup berpendidikan sangat jauh berbeda, saya berkata demikian karena saya terlibat langsung dalam pemungutan suara dan penghitungan suara, saya rasa masyarakat disini malas untuk mencampuri urusan pemerintahan karena bagi mereka memilih dan tidak memilih sama saja”(28-9-2018 pukul 11.00 wit dirumah kepala dusun kampung bendi)

Pandangan di atas membuat persepsi bahwa masyarakat yang paham dan berpendidikan belum tentu aktif dalam proses pemilihan dan bahkan tidak ikut memilih karena jenuh dan menganggap tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan.

Penulis juga melakukan penelitian secara Observasi Non-Partisipan dimana merupakan suatu “proses pengamatan observasi tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat”(Margono,2005: 161-16.). Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Setelah melakukan penelitian dari hasil observasi yang dilakukan penulis menyimpulkan apa yang diamati langsung dan ikutinya selama menulis berada ditempat atau lokasi penelitian . pada dtor mereka sibuk berkerja melaikan kurani

desa pao kec,tarwoang penulis biasanya terlibat dalam rapat kepumdaan dan rapat acara-acara besar .

Hasil penelitian yang dibuat penulis menyimpulkan memang benar bahwa masyarakat yang ikut pemilihan kepala desa pao pada tahun 2015 sebanyak 60% saja kemudian selibuhnya absen dalam pemilihan, dari yang penulis amati bukan hanya karena sibuk berkerja karena kurang sosialisasi dari panitia pemilihan kepala desa sendiri yang berkala jelas dan dalam melakukan sosialisasi dan masyarakat juga tidak terlibat secara langsung terhadap proses sosialisasi hanya dibagikan petunjuk tata cara pemilihan kepada kepala dusun dan Rk dusun lalu membagikan kepada warga dan memasukan DPT .Hal ini membuat masyarakat menganggap diabaikan dan tidak terlalu penting karena diperlakukan seperti itu sehingga membuat mereka tidak mau memilih,hal ini di akui oleh beberapa masyarakat yang tinggal didearah setempat penulis tinggal saat penulis tanyakan sewaktu melakukan observasi.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya partisipan masyarakat Desa Pao Kec.Tarwoang tergambar dalam pengetahuan masyarakat terhadap jalanya sistem politik dapat dikatakan cukup baik.Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban informan pada saat di wawancara mengenai pemilihan kepala desa ,mengenai calon kepala desa dan mengenai pentingnya memilih hal ini dibuktikan hampir 70% masyarakat Desa Pao memahaminya dengan Baik,Kemudian sama halnya yang diungkapkan Kepala Dusun Kampung Bendi BN :

“Pilkades itu penting,masyarakat pasti memahami dengan baik arti dari pilkades,apalagi mengenai pasangan calon kepala desa kemarin mereka

pasti mengenal dengan baik karena pasangan calon merupakan figure-figur yang sudah sejak lama aktif dalam perpolitikan di desa pao .saya juga yakin masyarakat sudah terbiasa dengan namanya pilkades karena masyarakat diisni juga banyak yang terlibat dalam perpolitikan ‘’(25-9-2018 pukul 10.30 WIT di rumah kepala dusun BN)

Pernyataan di atas dapat Politik partisipan masyarakat dan merealisasi dan memenggunakan hak-hak politiknya dengan demimikan masyarakat dalam mengambil keputusan politik menyadari bahwa hak dan kewajiban mereka dan menentukan para pemimpin maupun wakil mereka di pemerintahan. masyarakat Desa Pao cukup antusias dengan Pemilu dan memahami arti dari Pilkades itu sendiri,penulis mengambil kesimpulan demikian karena telah diungkapkan bawah oleh lebih kurang 60% masyarakat setempat yang mengaukinya , sama Halnya juga yang diungkapkan salah satu tokoh agama BG:

‘’Kami mengamalkan ajaran islam dalam setiap kegiatan,namun sebagai warga Indonesia kami juga tetap menghargai dan mengamalkan pancasila, mengikuti aturan hukum dan menjalankan roda pemerintahan salah satunya ikut partisipasi dalam pemilihan kepala desa itu yang biasanya diamaalkan oleh masyrakat disekitar disnini yang saya tau.’’(25-9-2018 pukul 13.00 WIT di rumah BG)

Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebagai seorang yang taat dalam beragama,dalam hal ini islam, mengajarkan pada masyarakat untuk taat akan hukum-hukum negara Indonesia, karena berada dalam wilayah kesatuan repbulik Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia.pancasila merupakan dasar negara yang dapat dipakai sebagai nilai universal pemersatu baik yang seagama maupun berbeda agama ,serta hukum hukum pemerintahan yang harus mereka ikuti sama halnya dengan melaksanakan dan ikut partisipasi dalam pemlihan kepala desa .Hal senada juga diungkapkan oleh ERA yang merupakan salah satu tokoh perempuan di Desa Pao mengakatan:

“ ibu-ibu disini walaupun sebagai besar wanita karir dan ibu rumah tangga mereka masih sering menyempatkan waktu untuk berkumpul arisan dan pengajian sama halnya saat pilkades ibu-ibu disini juga aktif dan bahkan ikut terlibat dalam halnya pemilihan kepala desa ,tentu saja mereka memahami arti dari pilkades hanya saja ibu-ibu disini yang berdagang dan berkerja yang jarang sekali ikut dalam proses pilkades karena mereka ada waktunya sore saja “(26-9-2018 pukul 10.00 wit di rumah ERA)

Wawancara diatas sudah barang tentu dari kaum perempuan juga berperan penting dan ikut dalam partisipasi saat pilkades berlangsung,sama halnya yang di katakana oleh salah satu tokoh pemuda dan juga wakil ketua karang taruna Desa pao yaitu IM :

“ pemuda-pemuda disini rata-rata juga sering terlibat dalam proses pilkades seperti ikut dalam sosialisasi dan panitia pemungutan suara,meraka juga biasanya bulat datu suara tergantung arahan dari tokoh masyarakat dan pemuda-pemmuda disini,jika kami berpandangan buruk terhadap calon dan tidak pantas untuk memimpin terkadang kami lebih memilih untuk golput semua”(30-9-2018 pukul 14.00 wit sekretariat karang taruna desa pao)

Pernyataan salah satu tokoh pemuda di atas dapat dikatakan bahwa pemuda-pemuda di Desa Pao mengerti dan memahami pilkades mereka juga ikut serta dalam proses dan berpartisipasi saat pilkades dan mereka paham sekali dengan kepemimpinan yang baik dan akan menyadari hak dan kewajibannya serta memergunakan secara aktif. Mereka akan dapat menilai dengan penuhkesadaran baik terhadap sistem sebagai totalitas, *input* dan *output* maupun terhadap posisi atau peran dirinya sendiri dan termasuk dalam ciri budaya politik partisipan yaituh di mana masyarakat Desa Pao sangat bersifat berpartisipasi terhadap semua obyek politik, baik menerima atau menolaknya dan kesadaran masyarakat Desa Pao bahwa mereka harus berperan aktif sebagai aktivis. Dan menyadari akan peran,

hak, kewajiban dan tanggung jawab pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa ada perasaan tertekaan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dari budaya politik masyarakat Desa Pao kecamatan, Tarwoang . yaitu memiliki tipe budaya politik Partisipan sama yang diajukan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya politik sangat dipengaruhi oleh orientasi politik yaitu afektif, kognitif dan evaluatif. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi sehingga menghasilkan tipe budaya politik Partisipan:

- g. Masyarakat Desa Pao sangat berpartisipasi terhadap semua obyek politik, baik menerima atau menolak suatu obyek politik.
- h. Kesadaran bahwa masyarakat adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
- i. Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua obyek politik.
- j. Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan.

B .Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

3. Masyarakat perlu di berikan pendidikan politik yang berorientasi pada kesadaran politik yang berdasarkan hati nuraninya,menjadikan masyarakat memilih secara cerdas,kritis,serta rasional dan bukan memilih kepala desa karena mendapatkan imbalan berupa uang dan lain-lain.
4. Pemerintah Desa perlu memeberikan pemberdayaan politik untuk seluruh masyarakat serta kesadaran politik tentang wewenang masyarakat sebagai warga negara khususnya mengawal,mengawasi,mengontrol,dan mengevaluasi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Arbi Sanit, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azis, A. (2015). "budaya politik masyarakat Indonesia dalam perspektif pembangunan politik". *Jurnal ASPIRASI*; Vol 5 (2)
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bismar Arianto. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam Pemilu "Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH volume 1"*. Tanjungpinang: Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Pasrtisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamal Muasik, *Skripsi Budaya Politik Kampus*. Universitas Negri Semarang. UNNES
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik* (terjemahan Laila Honoum Hisyam). Jakarta: Bina Aksara.
- Kurnia, Iman. 2016. "Budaya Politik orang rimba ditaman nasional bukit duabelas jambi" (jurusan s-1 : Universitas Lampung)
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama Pustaka Pelajar.

Mulyawan, Budi. 2015. Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Politik. *Jurnal Aspirasi* Vol.5 No.2 Februari 2015. Indramayu : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNWIR.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutomo, Archna. 2007. *Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. PT. Ghalia Utama. Jakarta

Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2008.

Widjaja, Albert.1988. *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Kerinci Buana



RIWAYAT HIDUP



A. Algi Paris , dilahirkan kampung bendi tanggal 4 Januari 1996. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan **Ayahanda A.Rusdi Tawang dan Ibunda Hj Nurnaningsih S,pd**. Penulis mengawali pendidikan formal mulai pada tahun 2002 di SD Inpres 252 Pao dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tarwoang dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bisappu dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan S1. Berkat Rahmat Allah SWT dan iringan doa dari keluarga serta teman-teman. Perjuangan panjang penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul **“Budaya Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pao Kec. Tarwoang Kab. Jeneponto**